



PAKAI ULANG - Pekerja membawa kotak suara yang diangkut dengan truk saat dipindahkan ke dugang logistik KPUD Kota Yogyakarta di Giwangan, Senin (3/10). Pemindahan, pembersihan, dan pengecekan kotak suara dan bilik suara itu akan digunakan pada Pemilu Kota Yogyakarta Februari mendatang.

TRIBUN JOGJA/HASAN SAKRI

Pilwalkot Pakai Kotak Suara Pilpres 2014

YOGYA, TRIBUN - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Yogyakarta akan menggunakan bilik dan kotak suara yang digunakan saat Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014 lalu untuk kebutuhan Pemilihan Wali Kota (Pilwalkot) Yogyakarta 2017 mendatang.

Komisiner KPU Kota Yogyakarta, Hidayat Widodo mengatakan untuk kebutuhan Pilwalkot, pihaknya tidak akan melakukan pengadaan kotak maupun bilik suara. Adapun kebutuhan Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Pilwalkot mendatang sebanyak 796 unit.

"Tiap TPS membutuhkan satu kotak suara. Kebutuhan kotak suara masih bisa berubah, tergantung hasil verifikasi data pemilih yang kini masih terus berjalan. Tapi kotak suara yang kami miliki lebih dari cukup, yakni 4.530 unit," kata Hidayat, Senin (3/10).

Dia menambahkan di tiap TPS pada Pilwalkot akan terdapat empat bilik suara. Berdasar catatan KPU, kebutuhan bilik suara mencapai 3.184 unit. Sementara untuk jumlah bilik suara yang dimiliki KPU dapat dikatakan lebih dari cukup, yakni 5.512 bilik suara.

"Selain di TPS, nanti kami akan menaruh tiga hingga empat kotak suara untuk memenuhi kebutuhan saat rekapitulasi hasil pemungutan suara di tingkat kecamatan. Kotak itu digunakan untuk menyimpan berbagai formulir," imbuhnya.

Dijelaskan Hidayat, KPU Kota Yogyakarta pada hari Rabu (5/10) hingga Kamis (6/10) akan melakukan pembersihan kotak dan bilik suara dari berbagai tempelan kertas dan stiker sisa Pilpres, dan melakukan

RABU 15 FEBRUARI 2017

● ke halaman 14

☐ Negatif ☐ Amat Segera ☐ Untuk Ditanggapi

Pilwalkot Pakai Kotak Suara

• Sambungan Hal 13

pengecekan kondisi fisik logistik yang akan digunakan. "Sementara untuk pengadaan surat suara baru akan dilakukan setelah DPT (Daftar Pemilih Tetap) ditetapkan. Penetapan dilakukan 8 November 2016 mendatang," ucapnya.

Kendala-coklit

Komisiner KPU Kota Yogyakarta, Sri Surani menyampaikan, pencocokan dan peneltian data pemilih di Pilwalkot akan dilakukan hingga 7 Oktober 2016 mendatang. Di Kota Yogyakarta, terdapat 345.297 pemilih yang harus diverifikasi langsung di lapangan.

Menurutnya, selama melakukan verifikasi, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) kerap tak bisa bertemu secara langsung dengan pemilih yang terdaftar di data pemilih. Kesulitan tersebut ditemui saat melakukan pemutakhiran di kawasan elite perkotaan.

"Misalnya seperti di Kotabaru. Banyak warga yang tercatat bertempat tinggal di sana, namun rumahnya digunakan sebagai tempat tinggal atau dikontrakkan," jelas Surani.

Dia menambahkan, pencoretan terhadap data pemilih hanya akan dilakukan ketika petugas memperoleh verifikasi dari pengurus RT atau RW setempat yang menyatakan bahwa pemilih tak lagi menjadi warga Yogyakarta. Oleh karena itu, petugas dimintanya berhati-hati.

"Hal ini untuk menjaga agar warga tetap tidak kehi-

langan hak pilihnya," tukasnya.

Dana mandiri

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Yogyakarta turut mengatur dana kampanye mandiri dari setiap paslon dalam kampanye Pilwalkot Yogyakarta 2017. Selain diatur, besaran dana yang digelontorkan untuk setiap kampanye pun juga diawasi oleh Panitia Pengawas (Panwas) Pilkada 2017.

Ketua KPU Kota Yogyakarta Wawan Budianto mengatakan, berdasarkan Peraturan KPU nomor 8 tahun 2015 tentang dana kampanye, KPU berhak melakukan pengawasan dana kampanye mandiri para paslon. Dana mandiri berarti dana yang digelontorkan oleh tim sukses paslon untuk keperluan kampanye, di luar dana hibah kampanye yang disediakan oleh KPU.

"Ada regulasinya untuk membatasi dan mengatur dana kampanye dari setiap paslon, di luar dana dari KPU," ujar Wawan kepada *Tribun Jogja*.

Ia menjelaskan, KPU akan melakukan rapat dengan para paslon untuk menyusun dana kampanye maksimal yang harus digunakan oleh paslon. Hasilnya, akan ditentukan besaran dana yang harus digunakan sesuai kesepakatan antara KPU dengan paslon.

"Misalnya diatur tentang dana kebutuhan pertemuan terbatas dalam kampanye. Berapa suvenir yang harus dikeluarkan. Semua diatur sehingga transparan penggunaan dananya," jelasnya.

Selanjutnya, imbuh Wawan, KPU akan bekerja sama dengan badan audit untuk meneliti besaran dana

yang telah digunakan setiap selesai kampanye. Tiap paslon juga wajib melaporkan segala bentuk sumbangan yang diterima kepada KPU dan akan diawasi oleh Panwas.

Komisiner Panwas Kota Yogyakarta Divisi Pencegahan dan Hubungan Antar-Lembaga Iwan Ferdian Susanto mengatakan, panwas akan berkoordinasi dengan KPU Kota Yogyakarta dan Paslon untuk mengawasi dana kampanye. Jika ditemukan pelanggaran, Panwas akan memberikan rekomendasi dugaan pelanggaran.

"Tergantung pelanggaran, bisa mendapat sanksi pidana hingga pembatalan paslon jika terbukti melanggar," ujar Iwan.

Ia menjelaskan, kerawanan dana kampanye berasal dari sumbangan-sumbangan yang masuk ke kantong tim paslon. Praktik yang biasa terjadi adalah sumbangan diberikan kepada anggota keluar paslon atau tim sukses, sehingga susah dideteksi.

"Karenanya Panwas berharap masyarakat atau media cukup aktif, jika melihat ada pelanggaran langsung melaporkan ke kita," tuturnya.

Sebelumnya, KPU kota Yogyakarta telah mengalokasikan 18 persen dari total anggaran pelaksanaan Pilwalkot Yogyakarta 2017 untuk fasilitas kampanye bagi pasangan calon (Paslon). Disebutkan Wawan, total anggaran sendiri mencapai Rp 14 miliar. 18 persen tersebut dialokasikan untuk fasilitas kampanye, berupa fasilitas alat peraga, bahan kampanye, iklan di media massa, dan debat paslon. (mrt/gil)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Sekretariat Komisi Pemilihan U	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 24 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005